

## STUDI EMPIRIS ATAS DAMPAK KEBIJAKAN KENAIKAN TARIF PPN TERHADAP DAYA BELI MASYARAKAT DAN INFLASI EKONOMI DOMESTIK

INTAN PURNAMA SARI<sup>1</sup>, NOFRIZAL<sup>2</sup>

Dosen Program Studi Manajemen Universitas Dharma Indonesia<sup>1</sup>, Dosen Intitut Teknologi Padang<sup>2</sup>

Email Koresponden : intanparayasa@gmail.com<sup>1</sup>

**Abstract:** *This study aims to analyse the impact of the policy to increase the Value Added Tax (VAT) rate from 11% to 12% on people's purchasing power and domestic economic inflation in Indonesia. This policy was implemented in order to increase state revenue, but it has economic consequences that need to be examined empirically. The VAT rate increase directly drives up the prices of consumer goods and services, which can reduce household consumption, especially among low-income groups. In a macroeconomic context, a decline in household consumption — which accounts for more than 50% of gross domestic product (GDP) — has the potential to slow economic growth. In addition, the VAT increase also drives cost-push inflation due to price adjustments at the producer and consumer levels. Using a descriptive approach and empirical literature study, this research finds that even though the rate increase is only 1%, its impact on purchasing power and inflation is quite significant, thus requiring supporting policies to maintain economic stability and protect vulnerable groups.*

**Keywords:** *VAT, purchasing power, inflation, household consumption, fiscal policy*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dari 11% menjadi 12% terhadap daya beli masyarakat dan inflasi ekonomi domestik di Indonesia. Kebijakan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara, namun menimbulkan konsekuensi ekonomi yang perlu dikaji secara empiris. Kenaikan tarif PPn secara langsung mendorong peningkatan harga barang dan jasa konsumsi, yang dapat menurunkan kemampuan konsumsi rumah tangga, terutama pada kelompok berpendapatan rendah. Dalam konteks makroekonomi, penurunan konsumsi rumah tangga — yang menyumbang lebih dari 50% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) — berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kenaikan PPn juga mendorong inflasi biaya (cost-push inflation) akibat penyesuaian harga di tingkat produsen dan konsumen. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan studi literatur empiris, penelitian ini menemukan bahwa meskipun kenaikan tarif hanya sebesar 1%, dampaknya terhadap daya beli dan inflasi cukup signifikan, sehingga diperlukan kebijakan pendukung untuk menjaga stabilitas ekonomi dan perlindungan terhadap kelompok rentan.

**Kata kunci:** PPN, daya beli, inflasi, konsumsi rumah tangga, kebijakan fiskal

### A. Pendahuluan

Pajak Pertambahan Nilai (PPn) merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam sistem perpajakan Indonesia. Sebagai pajak atas konsumsi, PPn dikenakan pada hampir seluruh barang dan jasa, sehingga kenaikan tarifnya memiliki dampak langsung terhadap harga barang konsumsi masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah melakukan penyesuaian terhadap tarif PPn sebagai bagian dari reformasi perpajakan dan upaya meningkatkan penerimaan negara. Namun, kebijakan kenaikan tarif PPn ini memunculkan kekhawatiran terhadap dampaknya pada kondisi ekonomi masyarakat, khususnya daya beli. Kenaikan tarif PPn cenderung menyebabkan meningkatnya harga barang dan jasa, yang pada akhirnya dapat mendorong inflasi dan menekan konsumsi rumah tangga, terutama pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (Sukmawati & Prasetyo, 2022). Di sisi lain, dari perspektif makro ekonomi, peningkatan PPn dapat membantu menyeimbangkan

anggaran dan mendukung pembiayaan pembangunan. Ketidakseimbangan antara tujuan fiskal pemerintah dan tekanan ekonomi terhadap masyarakat menimbulkan dilema kebijakan yang perlu dianalisis secara lebih dalam. Apalagi, di tengah pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, daya beli masyarakat masih relatif lemah dan rentan terhadap gejolak harga. Oleh karena itu, kajian terhadap implikasi kenaikan tarif PPN terhadap kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat menjadi penting sebagai dasar evaluasi efektivitas kebijakan dan pertimbangan keadilan ekonomi. Dalam studi empiris Konsumsi Rumah Tangga Menengah dijelaskan dalam penelitian para peneliti terdahulu, diantaranya,

Zein, A. W., Andini, A., & Sinka, V. (2025), menjelaskan dampak kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap konsumsi rumah tangga menengah: Studi Empiris dilakukan di kota besar, *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Perpajakan*, 2(3). <https://doi.org/10.61132/jeap.v2i3.1045>, berkesimpulan bahwa : Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan regresi linier berganda berbasis survei terhadap 400 rumah tangga di Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun beban pajak pada konsumsi pokok tidak meningkat signifikan, persepsi negatif masyarakat terhadap kenaikan PPN tetap menekan pengeluaran mereka, terutama pada barang dan jasa non-esensial (Areai).

Fadhilah, A., Fitriani, S. D., & Enjellika, J. Z. (2025), melakukan pendalaman terhadap pengaruh kenaikan PPN terhadap penurunan daya beli masyarakat, dalam penelitiannya menjelaskan; bahwa pengaruh kenaikan tarif kenaikan pajak pertambahan nilai (PPn) Terhadap Inflasi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, 10(1), 63–72. <https://doi.org/10.32503/cendekiaakuntansi.v10i1.6634>, menjelaskan bahwa, Berdasarkan tinjauan literatur, studi ini menyimpulkan bahwa kenaikan tarif PPn dari 10% ke 11%, dan direncanakan ke 12% pada 2025—berdampak signifikan terhadap inflasi. Kenaikan ini memicu kenaikan harga barang dan jasa, yang tercermin dalam Indeks Harga Konsumen (IHK) (Ejournal Uniska Kediri).

Disamping beberapa sitasi yang diuraikan diatas, banyak lagi penelitian terdahulu yang telah dilakukan para peneliti yang berkaitan tentang dampak kenaikan nilai PPn terhadap dampaknya terhadap perekonomian masyarakat daya beli masyarakat secara makro, sebagai mana yang dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 1 Penelitian Sejenis Dari Peneliti Terdahulu

No	Judul Penelitian	Ringkasan Singkat Penelitian
1	Faktor-Faktor ... PPN dan PPnBM di Indonesia (1986–2015)	Analisis kuantitatif multivariat (OLS): variabel ekonomi seperti PDB dan konsumsi mendukung penerimaan PPn, sedangkan inflasi dan suku bunga negatif <i>Jurnal Universitas Negeri Medan</i>
2	Dampak Kenaikan PPN Terhadap Konsumsi Rumah Tangga Menengah	Survei kuantitatif di kota besar: persepsi kenaikan PPn mengurangi pengeluaran non-esensial <i>Ejournal Areai</i>
3	Analisis Potensi Penerimaan PPn via Tabel Input-Output	Estimasi potensi penerimaan PPn meningkat setiap tahun; rasio penagihan juga naik <i>Jurnal STIE AAS</i>
4	Analisis Dampak Perubahan Tarif PPN terhadap Sektor Ekonomi Indonesia	Regresi kuantitatif: tarif PPN terkait signifikan dengan konsumsi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi <i>Ruang Publikasi Ilmiah</i>

Berdasarkan studi latar belakang masalah diatas, penulis dalam artikel ini ingin menganalisis dan mengukur hubungan antara kenaikan tarif PPn dan penurunan indeks daya beli masyarakat secara makro.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literatur ekonomi dan kebijakan fiskal, khususnya dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia. Dengan melakukan studi empiris terhadap dampak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), penelitian ini diharapkan dapat: Menambah referensi ilmiah terkait hubungan antara kebijakan perpajakan dan indikator makroekonomi seperti daya beli masyarakat dan inflasi, Menjadi dasar bagi penelitian lanjutan yang ingin mengkaji efek jangka pendek dan jangka panjang dari kebijakan fiskal serupa, Memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai elastisitas konsumsi masyarakat terhadap perubahan tarif pajak tidak langsung.

## B. Metoda Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (literature review). Literature review merupakan metode pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian ini (Adlini et al., 2022). Sumber yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data-data yang diperoleh melalui pendekatan studi kepustakaan, sehingga data-data tersebut dihimpun dari berbagai informasi yang relevan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian ini. Data-data tersebut diperoleh melalui buku-buku literature, karya tulis ilmiah, tugas akhir, penelitian-penelitian terdahulu, dan sumber-sumber kepustakaan yang lainnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan untuk menganalisis hubungan dan dampak antara kenaikan tarif PPN terhadap kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat di Indonesia. Pendekatan ini dipilih agar data yang diperoleh dapat diolah secara statistik guna menghasilkan temuan yang objektif dan terukur, dengan scenario penelitian sebagai berikut :Pendekatan Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, teknik Analisis Data,dan pemahasan menuju terhadap dari tujuan penelitiannya.

## C. Hasil Dan Pembahasan

### Pajak Pertambahan Nilai (PPn)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak distribusi tidak langsung yang dikenakan atas nilai tambah (Value Added Tax) saat penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP). Pihak yang memungut adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP), tetapi beban pajaknya ditanggung oleh konsumen akhir. Secara kuantitatif, PPN merupakan persentase tetap dari nilai dasar transaksi 10 %, 11 %, atau 12 % yang dikenakannya bergantung pada periode berlakunya regulasi. Pemahaman tentang DPP (Dasar pengenaan pajak) sangat penting karena menentukan dasar hitungan. Tarif dan cara perhitungan PPn ini diatur melalui Undang-Undang dan Peraturan Pelaksana.

Besaran nilai DPP untuk menentukan nilai PPn suatu barang mencakup beberapa komponen, tergantung jenis transaksi, diantaranya :

- 1.Harga Jual: Termasuk semua biaya yang diminta/dibebankan oleh penjual (kecuali PPN dan potongan harga).
- 2.Penggantian: Nilai jasa atau barang tidak berwujud.
- 3.Nilai Impor: Termasuk bea masuk dan pungutan lainnya (kecuali PPN/PPnBM).
- 4.Nilai Ekspor: Semua biaya yang dibebankan eksportir.
- 5.Nilai Lain: Ditentukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan PMK.liputan6.comSahabat Pegadaian

Adapun factor-fakator yang akan mempengaruhi penerimaan PPn terhadap negara secara makro dapat ditampilkan sebagai berikut :

Penelitian menggunakan regresi linier berganda (OLS) menganalisis pengaruh berbagai variabel makro terhadap penerimaan PPN (1986–2015): jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP), PDB, ekspor, impor, inflasi, belanja konsumsi, populasi, dan suku bunga SBI.

1. Hasil: Secara bersama-sama, variabel-variabel tersebut secara signifikan mempengaruhi penerimaan PPn.
2. Secara parsial: PKP, PDB, ekspor, impor, konsumsi, populasi → berpengaruh positif.
3. Inflasi dan SBI → berpengaruh negatif Jurnal Universitas Negeri Medan.

### **Dampak Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) Bagi Masyarakat Indonesia**

Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) di Indonesia memiliki dampak yang luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Berikut penjelasan dampak kenaikan PPn dari berbagai sudut pandang:

#### **1. Dampak Terhadap Konsumen (Masyarakat Umum)**

Secara umum kenaikan nilai PPn terhadap konsumen atau secara luas terhadap perekonomian masyarakat dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Kenaikan harga barang dan jasa: Karena PPn dibebankan kepada konsumen akhir, kenaikan tarif PPn (misalnya dari 11% menjadi 12%) akan langsung menaikkan harga barang dan jasa. Ini berdampak pada daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
- b. Tekanan terhadap kebutuhan pokok: Jika barang-barang kebutuhan sehari-hari ikut terdampak, masyarakat akan merasakan beban ekonomi yang lebih berat, meskipun beberapa barang pokok biasanya dikecualikan dari PPn atau dikenakan tarif yang lebih rendah.
- c. Penurunan konsumsi: Daya beli yang menurun akan membuat masyarakat cenderung menunda pembelian atau mengurangi konsumsi, terutama barang-barang non-prioritas.

#### **2. Dampak Kenaikan PPn terhadap Sosial dan Ekonomi Makro**

Dampak ekonomi makro mengacu pada pengaruh kebijakan atau peristiwa tertentu terhadap perekonomian secara keseluruhan, bukan hanya individu atau kelompok kecil. Dalam konteks peningkatan Pajak Pertambahan Nilai (PPn), dampak ekonomi makro berarti bagaimana kenaikan pajak tersebut memengaruhi berbagai indikator besar dalam perekonomian nasional.

- a. Inflasi meningkat: Kenaikan PPn akan mendorong kenaikan harga barang dan jasa secara umum, yang pada akhirnya dapat meningkatkan laju inflasi nasional.
- b. Penurunan konsumsi domestik: Daya beli masyarakat yang menurun akan menekan konsumsi rumah tangga, yang merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
- c. Perlambatan pertumbuhan ekonomi: Jika konsumsi dan investasi menurun karena PPn yang lebih tinggi, pertumbuhan ekonomi nasional bisa melambat, terutama dalam jangka pendek.

### **Analisis Dan Pembahasan**

Pajak Pertambahan Nilai (PPn) merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara. Pemerintah Indonesia berencana menaikkan tarif PPn dari 11% menjadi 12% sebagai bagian dari reformasi perpajakan dalam rangka meningkatkan rasio pajak terhadap PDB dan menjaga kesinambungan fiskal jangka panjang. Namun, kebijakan ini berpotensi menimbulkan konsekuensi terhadap kondisi ekonomi domestik, terutama pada dua aspek penting: daya beli masyarakat dan inflasi.

### **Dampak Terhadap Daya Beli Masyarakat**

Kenaikan tarif PPn secara langsung meningkatkan harga jual barang dan jasa konsumsi. Produk yang semula dikenakan PPn 11% akan mengalami penyesuaian harga saat tarif naik menjadi 12%. Meski terlihat kecil (selisih 1%), akumulasi pada berbagai produk kebutuhan pokok dan non-pokok dapat menurunkan kemampuan konsumsi masyarakat, terutama di kelompok berpenghasilan rendah. Dengan perubahan 1 %, maka nilai barang akan mengalami

kenaikan secara buruto akan terjadi kenaikan nilai barang suatu prodak. Studi-studi empiris menunjukkan bahwa kenaikan PPn cenderung menurunkan konsumsi rumah tangga. Dalam konteks Indonesia, di mana konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari 50% terhadap PDB, penurunan konsumsi bisa berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

#### **Dampak Terhadap Inflasi Ekonomi Domestik**

Secara teori ekonomi, kenaikan tarif PPn menyebabkan peningkatan inflasi biaya (cost-push inflation). Produsen dan pedagang akan menyesuaikan harga jual untuk menutupi kenaikan pajak, yang secara otomatis tercermin dalam indeks harga konsumen (IHK). Dampak pada inflasi inti bisa menjadi perhatian karena mencerminkan tekanan inflasi yang lebih mendasar. Sementara itu, barang-barang yang tidak dikenai PPn atau bersubsidi bisa memiliki efek penahan, tetapi secara umum tren inflasi akan mengalami kenaikan dalam jangka pendek.

#### **D. Penutup**

##### **Simpulan**

1. Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dari 11% menjadi 12% meskipun secara nominal hanya meningkat 1%, terbukti memiliki dampak yang signifikan terhadap kondisi ekonomi domestik, khususnya pada daya beli masyarakat dan tingkat inflasi.
2. Secara langsung, kenaikan tarif ini menyebabkan peningkatan harga barang dan jasa konsumsi, yang jika diakumulasi pada berbagai produk kebutuhan pokok dan non-pokok, berdampak pada penurunan kemampuan konsumsi masyarakat. Dampak ini paling dirasakan oleh kelompok berpenghasilan rendah yang memiliki proporsi pengeluaran konsumtif lebih besar terhadap pendapatan mereka.
3. Studi empiris menunjukkan bahwa peningkatan tarif PPn cenderung menurunkan konsumsi rumah tangga. Dalam konteks Indonesia, hal ini menjadi krusial karena konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari 50% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Oleh karena itu, penurunan konsumsi akibat kenaikan harga yang dipicu oleh PPn dapat menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
4. Selain itu, peningkatan tarif PPn juga berkontribusi terhadap inflasi, baik secara langsung melalui kenaikan harga barang konsumsi, maupun secara tidak langsung melalui efek berantai dalam rantai pasokan. Inflasi yang timbul dari kebijakan ini berpotensi menekan stabilitas ekonomi jika tidak diimbangi dengan kebijakan kompensasi atau pengendalian harga yang memadai. Pemerintah perlu mengimplementasikan mekanisme kompensasi seperti bantuan sosial, subsidi, atau penurunan pajak lain untuk menjaga daya beli.

##### **Saran**

1. Peningkatan transparansi penggunaan dana pajak untuk memperkuat kepercayaan masyarakat.
2. Pelaksanaan kebijakan dilakukan secara bertahap dan terkomunikasi dengan baik, agar pelaku pasar dapat melakukan penyesuaian.

##### **Daftar Pustaka**

- Aimmatul Fadhilah, Silvi Dwi Fitriani, Jingga Zahara Enjellika, *Pengaruh Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPn) Terhadap Inflasi Di Indonesia*
- Fadhilah, A., Fitriani, S. D., & Enjellika, J. Z. (2025). *Pengaruh Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPn) Terhadap Inflasi di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, 10(1), 63–72. <https://doi.org/10.32503/cendekiaakuntansi.v10i1.6634> (Ejournal Uniska Kediri)
- Fadhilah, A., Fitriani, S. D., & Enjellika, J. Z. (2025). *Pengaruh Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPn) Terhadap Inflasi di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, 10(1), 63–72. <https://doi.org/10.32503/cendekiaakuntansi.v10i1.6634>

- Putri, I. (2024). *Kenaikan PPN 12% dan Dampaknya terhadap Ekonomi*. Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA), 8(2), 934–944. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i2.4077>
- Republika.co.id. (2024, 17 Desember). *PPN Naik Jadi 12 Persen, Ini Dampaknya Terhadap Inflasi*. *Republika Online*. (Republika Online)
- Republika.co.id. (2024, 17 Desember). *Keputusan Pemerintah Naikkan PPN Berisiko Picu Kenaikan Inflasi*. *Republika Online*. (Kompas)
- Republika.co.id. (2024, 21 Desember). *Kemenkeu Sebut Dampak Kenaikan PPN terhadap Inflasi Hanya 0,2 Persen*. *Republika Online*. (Republika Online)
- Sukmawati, I., & Prasetyo, A. (2022). *Dampak Kenaikan Tarif PPN terhadap Daya Beli Masyarakat di Indonesia*. Jurnal Kebijakan Ekonomi, 14(2), 87–98.
- Zein, A. W., Andini, A., & Sinka, V. (2025). *Dampak Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Konsumsi Rumah Tangga Menengah: Studi Empiris di Kota Besar*. Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Perpajakan, 2(3). <https://doi.org/10.61132/jeap.v2i3.1045>